ABSTRAK

Noormala, *Praktik Joki Dalam Pendaftaran Dan Pelatihan Kartu Prakerja Di Desa Aluh Aluh Besar, Kecamatan Aluh Aluh, Kabupaten Banjar*, Skripsi, Pembimbing Tuti Hasanah, SEI, S.Pd, MHI. pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Joki, Kartu Prakerja.

Fenomena jasa joki dalam pendaftaran dan pelatihan Kartu Prakerja menjadi bentuk realitas sosial baru yang muncul sebagai respons atas rendahnya literasi digital masyarakat, termasuk di Desa Aluh Aluh Besar, Kecamatan Aluh Aluh, Kabupaten Banjar. Praktik ini tetap terjadi meski sudah ada larangan yang jelas pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa “pendaftaran Program Kartu Prakerja harus dilakukan secara mandiri oleh calon penerima”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik joki tersebut dilaksanakan dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik ini berdasarkan akad *ijārah* dan *wakalah bil ujah*.

Penelitian ini dilakukan di Desa Aluh Aluh Besar, Kecamatan Aluh Aluh, Kabupaten Banjar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi dengan pelaku joki dan pengguna jasa. Informan dalam penelitian ini adalah seseorang berprofesi sebagai Joki pendaftaran Kartu Prakerja dan orang yang menggunakan jasa tersebut, pada awalnya memiliki 10 informan namun yang dapat di wawancara cuman 4 informan, dengan jumlah 2 orang Joki dan 2 orang pengguna jasa Joki.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik joki dilakukan dengan sistem upah 50% dari insentif, namun dilakukan tanpa adanya akad yang sah dan disertai dengan penyembunyian informasi penting mengenai uang pada pelatihan berikutnya sebesar 50 ribu. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini mengandung unsur *ghisy* dan *tadlis*, yaitu penipuan tersembunyi dan penyamaran informasi yang menimbulkan ketidakjujuran dalam transaksi. Hal ini menjadikan praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam muamalah Islam. Praktik ini pada tinjauan hukum ekonomi syariah masuk dalam akad *ijārah* dan *wakalah bil ujah* yang di larang dan merupakan akad yang tidak sah secara hukum ekonomi syariah.